

RENCANA KERJA



SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renja ini diharapkan dapat dijadikan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai suatu instrumen kebijakan daerah, Renja memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, karena selain dapat memberikan arah dalam pelaksanaan kerja, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja itu sendiri. Selain itu Renja adalah sebagai acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala selama kurun waktu 1 (satu) Tahun. Adapun tujuan dari penyusunan Renja adalah untuk menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan pada masa sekarang maupun mendatang.

Demikian, semoga Renja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Marabahan, Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH



Ir. H. ZULKIPLI YADI NOOR, M.Sc
NIP. 19660705 199203 1 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Barito Kuala yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif sesuai Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak tahapan awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur

penyusunannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja dimulai dengan adanya surat edaran dari Sekretaris Daerah, yang menegaskan bahwa tiap Perangkat Daerah wajib membentuk Tim Penyusun Renja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.

Tim Penyusun tersebut kemudian bekerja menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang di masyarakat .

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, maka Sekretariat Daerah mendukung **Tujuan Ke 3 RPD** yaitu :

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani”.

Latar belakang terkait dengan substansi perencanaan, Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat;
 20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025, sedangkan tujuannya sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program, kegiatan dan Sub-Kegiatan pada Sekretariat Daerah;
4. Mengarahkan program, kegiatan dan sub-kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja lima Tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Progran dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT
DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan.

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2023-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 4 tahun, menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Dalam rangka mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Sekretariat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan dalam menjalankan kinerja pimpinan. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Setda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Revisi II
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala 2023-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan				Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih akuntabel, kapabel dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	57,71	60,00	62,00	63,00	Meningkatnya efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Nilai Akhir Variabel Indikator yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	55,01	60,10	63,10	66,10
								Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai Hasil Evaluasi LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri	3.1836	3.2838	3.3894	3.4842
							Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Total Nilai pembobotan dari 8 komponen penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan	58.7	70.1	74.7	80.01
							Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Total dari Nilai persepsi per Unsur / Total unsur yang terisi) X Nilai penimbang	87	88	89	90
							Terwujudnya Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Lolos WBK	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan kriteria/ predikat WBK yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB	3	3	3	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemkab	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten	70,94	72,94	74,94	76,94	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan	Nilai hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB	11,30	11,90	12,50	13,90
							Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah skor atas 4 komponen penilaian SAKIP Sekretariat Daerah	76,01	78,05	80,25	82,01

Tabel 2.2
Target Kinerja Setda Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	55,01
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3,1836
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	58,70
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,00
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Komponen Laporan	Nilai	11,30
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	76,01

Selanjutnya dari tabel di atas akan digambarkan capaian pada masing-masing Indikator kinerja beserta penjelasannya pada pembahasan Analisis Capaian Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah berdsarkan penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja yang telah terjadi pada tahun 2023.

Untuk Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, di bawah ini ditampilkan penyesuaian Nomenklatur Program – Kegiatan – Sub Kegiatan Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1350 Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala

Kode / Program	Kode / Kegiatan	Kode / Sub Kegiatan
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Kode / Program	Kode / Kegiatan	Kode / Sub Kegiatan
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kode / Program	Kode / Kegiatan	Kode / Sub Kegiatan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	X.XX.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	X.XX.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	X.XX.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi	X.XX.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi	X.XX.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi	X.XX.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	X.XX.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	X.XX.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	X.XX.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Untuk Sasaran dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan Serta sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4

**Sasaran dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala**

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang diimplementasikan	Meningkatnya produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Persentase tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas/sesuai peraturan pembentukan perundang-undangan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun
		Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara	Persentase penanganan perkara hukum yang diselesaikan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum
		Meningkatnya pelayanan Informasi Hukum	Persentase produk hukum yang terdokumentasi sebagai Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi
	Persentase capaian SPM urusan Pemerintahan	Optimalisasi kebijakan urusan Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian SPM urusan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
				Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
	Persentase capaian IKK urusan Pemerintahan		Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK urusan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi kerja Sama Dalam Negeri
	Persentase capaian SPM urusan Kesejahteraan Rakyat		Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian SPM urusan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	Persentase capaian IKK urusan Kesejahteraan Rakyat	Optimalisasi kebijakan urusan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK urusan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
				Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Meningkatnya efektivitas Kebijakan urusan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian SPM urusan Administrasi Pembangunan	Optimalisasi kebijakan urusan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian SPM urusan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah
	Persentase capaian IKK Makro urusan Administrasi Pembangunan		Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK Makro urusan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
	Persentase capaian IKK urusan Administrasi Pembangunan		Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK urusan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	Persentase capaian IKK Makro urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam		Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK Makro urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
				Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	Persentase capaian IKK urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Optimalisasi kebijakan urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
	Persentase Kebijakan urusan Pengadaan Barang dan Jasa yang diimplementasikan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
				Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
				Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Terwujudnya Perangkat Daerah yang Proporsional dan menerapkan Pelayanan Prima	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat ukuran	Persentase Perangkat Daerah yang tepat ukuran	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan standarisasi pelayanan	Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Terwujudnya Peembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah Pelayanan	Jumlah Perangkat Daerah yang lolos tahapan administrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Perangkat Daerah pelayanan	Persentase Perangkat Daerah pelayanan yang menerapkan Pembangunan Zona Integritas	Terlaksananya pembinaan Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah pelayanan	Jumlah Perangkat Daerah pelayanan yang dibina
Meningkatnya kualitas LKjIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP komponen Pelaporan Kinerja minimal 13	Meningkatnya LKjIP Perangkat Daerah yang sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Persentase Perangkat Daerah dengan pelaporan kinerja sesuai Permenpan 53 tahun 2014	Terlaksananya pembinaan penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Urusan Administrasi Umum	Rata-rata capaian komponen penilaian evaluasi SAKIP	Meningkatnya kualitas Perencanaan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	Tersedianya dokumen perencanaan kinerja	Jumlah dokumen perencanaan kinerja
		Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	Tersedianya dokumen pengukuran kinerja	Jumlah dokumen pengukuran kinerja
		Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja	Tersedianya dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja
		Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Tersedianya dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Jumlah dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal
	Persentase cakupan layanan administrasi umum perkantoran	Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Urusan Administrasi Umum	Persentase cakupan layanan administrasi umum perkantoran			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Terwujudnya Pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
				Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Tabel 2.5
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Barito Kuala
(Tabel T.C. 29)

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	100	100	100	100	100	100	100	100
						Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90.00	83.74	85.00	83.25	97.94	87.00	87.25	96.94
						Jumlah Perangkat Daerah yang lolos tahapan administrasi	3	-	3	-	0	3	-	-
						Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP komponen Pelaporan Kinerja minimal 13	100	57.45	100	61.70	61.70	74.47	61.70	61.7
						Rata-rata capaian komponen penilaian evaluasi SAKIP	100	92.48	100	94.30	94.30	100	98.68	98.68
						Persentase cakupan layanan administrasi umum perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	27.00	22.13	24.5	24.48	99.92	25.50	25.70	95.19
						Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	19.00	14.70	17.20	17.1	99.42	17.50	17.60	92.63
						Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja	13.01	10.07	10.45	10.4	99.52	10.50	10.50	80.71
						Nilai evaluasi SAKIP dari komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	23.00	20.46	22.46	22.3	99.29	22.51	22.50	97.83
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4128	936	984	1008	102.44	1032	2,976	72.09
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4	1	1	1	100	1	3	75.00
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	1	2.03	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi	80	21	10	10	100	10	41	51.25

RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

4	1	1	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	1	2.05	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.05	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	1	2.07	1	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	13	1	2	2	100	5	8	61.54
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17	1	1	1	100	11	13	76.47
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	104	23	19	19	100	25	67	64.42
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75.00

RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	4	4	4	100	17	25	62.50
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	116	18	18	18	100	34	70	60.34
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	370	47	68	68	100	91	206	55.68
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80	12	14	14	100	26	52	65.00
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	192	48	48	48	100	24	120	62.50
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	44	11	11	11	100	9	31	70.45
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	1	2.12		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat ukuran	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase Perangkat Daerah pelayanan yang menerapkan Pembangunan Zona	100	-	100	100	100	100	100	100
						Persentase Perangkat Daerah dengan pelaporan kinerja sesuai Permenpan 53 tahun 2014	100	57.45	100	61.70	61.70	100	61.70	61.70
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	48	12	12	12	100	12	36	75.00

RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum Daerah yang diimplementasikan	100	100	100	100	100	100	100	100.00
						Persentase capaian SPM urusan Pemerintahan	100	88.38	100	90.06	90.06	100	92.59	92.59
						Persentase capaian IKK urusan Pemerintahan	100	95.12	100	95.27	95.27	100	97.91	97.91
						Persentase capaian SPM urusan Kesejahteraan Rakyat	100	90.05	100	92.71	92.71	100	95.16	95.16
						Persentase capaian IKK urusan Kesejahteraan Rakyat	100	92.44	100	94.18	94.18	100	94.74	94.74
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian SPM urusan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK urusan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian SPM urusan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK urusan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas/sesuai peraturan pembentukan perundang-undangan	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1600	412	400	423	105.75	400	1,235	77.19
	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penanganan perkara hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	2	2	2	100	3	7	70.00
	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang terdokumentasi sebagai Informasi Hukum	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1600	412	400	423	105.75	400	1,235	77.19
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK urusan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	48	12	12	12	100	12	36	75.00

4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian SPM urusan Administrasi Pembangunan	100	90.08	100	90.27	90.27	100	92.88	92.88
						Persentase capaian IKK Makro urusan Administrasi Pembangunan	100	88.73	100	90.61	90.61	100	90.72	90.72
						Persentase capaian IKK urusan Administrasi Pembangunan	100	90.52	100	92.05	92.05	100	94.58	94.58
						Persentase capaian IKK Makro urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100	86.37	100	89.28	89.28	100	90.64	90.64
						Persentase capaian IKK urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100	88.40	100	89.84	89.84	100	91.08	91.08
						Persentase Kebijakan urusan Pengadaan Barang dan Jasa yang diimplementasikan	100	93.66	100	95.75	95.75	100	97.80	97.80
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK Makro urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK Makro urusan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	48	12	12	12	100	12	36	75.00
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1200	200	250	250	100	250	700	58.33

2.2 Analisis Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan output berupa rencana Pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala telah menyusun Renstra 2023-2026 dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Barito Kuala. Renstra ini merupakan Dokumen untuk periode 4 Tahun dan memuat Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan. Analisis serta pencapaian Kinerja dan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagaimana berikut:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Setda Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	55,01	55,10	100,16
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3,1836	3,1443	98,77
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	58,70	68,06	115,95
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,00	87,25	100,29
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Komponen Laporan	Nilai	11,30	10,40	92,04
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	76,01	76,30	100,38

Dapat dilihat dari tabel 2.6 di atas, ditemukan 3 (tiga) indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja yang telah melebihi target terhadap target Renstra dan 2 (dua) indikator kinerja terhadap target Renstra yang masih belum mencapai target, dengan demikian bagi kinerja yang telah melebihi target maka perlu merumuskan kembali perencanaan kinerja dengan cara meningkatkan target kinerja tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dengan catatan apabila capaian tahun lalu telah melebihi dari target tahun berikutnya dengan menggunakan metode **achievable** (realistis dapat dicapai pada periode yang akan datang), selanjutnya dalam perencanaan kinerja untuk masa mendatang, maka pada bab ini perlu menyajikan gambaran analisis faktor keberhasilan dan kendala/hambatan yang dihadapi pada tahun lalu sehingga dirumuskan upaya-upaya perbaikan maupun upaya dalam mempertahankan capaian kinerja berupa kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran (refocusing anggaran)

pada periode mendatang sebagai bentuk intervensi Renja 2025 terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2025.

Berikut gambaran analisis faktor keberhasilan dan kendala/hambatan yang dihadapi pada tahun lalu meliputi :

1. Analisis Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Adapun faktor-faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Indeks Reformasi Hukum (IRH) yaitu sebagai berikut :

- a. Telah melakukan Optimalisasi dalam kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi untuk Pengangkatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
- b. Telah melakukan keikutsertaan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam pengembangan kompetensi melalui Bimbingan teknis, pelatihan dan workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal.
- c. Pengelolaan database Peraturan Perundang-Undangan melalui JDIH terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

Sedangkan faktor-faktor kegagalan/penghambat dalam pencapaian kinerja Indeks Reformasi Hukum (IRH) yaitu sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah
- b. Masih rendahnya tingkat kehadiran pimpinan Tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambil keputusan
- c. Masih rendahnya kelengkapan data dukung dalam Laporan Evaluasi PUU
- d. Belum ada kegiatan yang mengarah kepada analisis dan evaluasi hukum secara periodik

2. Analisis Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Adapun faktor-faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 1,095% atau dari 66,64% pada tahun 2021 menjadi 67,37% pada tahun 2022;
- b. Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar -7,045% atau dari 5,11% pada tahun 2021 menjadi 4,75% pada tahun 2022;
- c. Angka Pengangguran meningkat 12,73% atau dari 3,22% pada tahun 2021 dan 3,63% pada tahun 2022;
- d. Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar 13,25% atau dari 3,17% pada tahun 2021 menjadi 3,59% pada tahun 2022;
- e. Untuk PDRB Perkapita mengalami peningkatan 3,67% yang mana pada tahun 2021 sebesar Rp. 9.868.000 kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 10.230.000
- f. Ketimpangan pendapatan juga mengalami peningkatan sebesar 1,76% yang mana pada tahun 2021 sebesar 0,284% kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,289%.

Selanjutnya faktor-faktor kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah sebagai berikut :

- a. Kontruksi Perpompaaan Menengah di Lahan Pasang Surut dapat dikembangkan dengan mengatur tata air dan menentukan waktu yang tepat pola tanam setiap komodi yang akan diusahakan. Untuk permasalahan mengenai Kontruksi Perpompaaan Menengah di kabupaten Barito Kuala tahun 2022 tidak ada masalah.

- b. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2022 hanya mampu mengcover Lahan Padis luas 123 Ha dari 3.000 Ha yang di targetkan. Masih rendahnya capaian ini sebabkan pada di tingkat petani masih ada yang trauma untuk mengikuti program asuransi pertanian (Jasindo) akibat 2 kali kesulitan/kegagalan pada saat mengkalim asuransi yang mereka ikuti.
- c. Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru diharapkan dapat meningkatkan Konektivitas pengguna jalan Desa dan sekitarnya sehingga akan meningkatkan arus barang dan jasa yang memberi dampak positif bagi perekonomian Desa sekitarnya.

3. Analisis Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Adapun faktor-faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah sebagai berikut :

- a. Indikator keberhasilan dalam pemanfaatan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP (nilai RUP) sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2023. Penilaian untuk indikator ini dilakukan untuk jumlah pagu RUP yang sudah diumumkan dalam aplikasi SiRUP.
- b. Penilaian indikator *e-Tendering* diukur dari Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan fitur e-tendering di SPSE berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP. Formula yang digunakan adalah persentase nilai pagu *e-Tendering* pada SPSE dibagi dengan data nilai pagu *e-Tendering* yang diumumkan pada aplikasi SiRUP

- c. Tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik. Penilaian indikator *e-purchasing* diukur dari Perangkat Daerah yang sudah menyelesaikan paket hingga pencatatan pada aplikasi e-katalog sampai dengan tahap serah terima paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Penilaian ITKP tahun 2023 untuk indikator *e-Purchasing* diambil dari data penyelesaian *e-Purchasing* tahun 2022.
- d. Proses pemilihan dengan metode Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE baik melalui transaksional maupun pencatatan. Penilaian indikator *non e- tendering/non e-purchasing* diukur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan dan/atau mencatatkan pelaksanaan paket *non etendering/non e-purchasing* pada SPSE dibagi dengan data *non e tendering/non e-purchasing* yang ada pada aplikasi SiRUP.
- e. Keterisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di K/L/P dengan cara membandingkan jumlah JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ yang telah ditetapkan oleh LKPP.

Selanjutnya faktor-faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya kepuasan penerima layanan terhadap tenaga SDM dilingkungan UKPBJ.
- b. Meningkatnya ekspektasi penerima layanan terhadap efisiensi tata kelola pengadaan di lingkungan UKPBJ karena perkembangan teknologi informasi.
- c. Meskipun telah dilakukan pelatihan bagi tenaga SDM UKPBJ, peningkatan kinerja pelayanan yang diharapkan, membutuhkan pembinaan lebih lanjut dari pemangku layanan umum pada unit kerja masing-masing demi meningkatkan

kepuasan dari penerima layanan. Oleh karena itu kedepannya, UKPBJ berencana akan terus melaksanakan monitoring dengan bertujuan agar kualitas pelayanan sesuai dengan harapan penerima layanan.

4. Analisis Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adapun Faktor-faktor Keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Membentuk satgas pelayanan publik
2. Melakukan pendampingan pada unit pelayanan publik.
3. Melaksanakan bimtek bagi petugas pelayanan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan standar pelayanan pada unit pelayanan publik
5. Internalisasi penyusunan SKM dan standar pelayanan

5. Analisis Capaian Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan kinerja level pemerintah daerah dan lever Perangkat daerah belum sepenuhnya menyajikan analisis keberhasilan dan analisis kegagalan dari setiap kinerja yang ditetapkan serta upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan sehingga laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan perencanaan ke depan.
- b. Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan, hal

ini dapat dilihat dari penetapan target perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

6. Analisis Capaian Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah

Adapun faktor-faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Telah menyusun perencanaan kinerja yang didahului dengan penyusunan Pohon Kinerja berdasarkan isu strategis yang dihadapi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2023- 2026, Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Rencana Aksi atas PK. Dokumen Perencanaan Kinerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2019;
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan dan seluruhnya telah dipublikasikan pada website esr.menpan.go.id serta e-SAKIP Batola;
- c. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah telah memenuhi kriteria tujuan dan sasaran yang baik dan dapat ditindaklanjuti secara nyata serta dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) yang memenuhi kriteria SMART, cukup dan bersifat sustainable;
- d. Indikator Keberhasilan Tujuan dan Indikator Keberhasilan Sasaran telah disertai dengan Penetapan target kinerja;
- e. Target yang ditetapkan atas Indikator keberhasilan Tujuan dan sasaran telah realistis, memungkinkan untuk dicapai

- dan bersifat menantang yang menunjukkan adanya keinginan untuk peningkatan kinerja;
- f. Perencanaan Kinerja yang disusun telah memberikan informasi yang cukup tentang kinerja yang harus dicapai, terlihat hubungan kausalitas, kesinambungan dan keselarasan pada tiap level jabatan;
 - g. Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah telah mendukung dan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
 - h. Rencana Aksi kinerja telah dipantau secara berkala yang ditunjukkan dengan adanya Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi bulanan dan triwulanan.
 - i. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dilengkapi dengan definisi operasional/ makna yang jelas, formulasi perhitungan yang tepat dan sumber data;
 - j. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur kinerja dan mendukung pencapaian kinerja yang diharapkan;
 - k. Sekretaris Daerah selaku pimpinan perangkat daerah selalu terlibat di setiap pengambilan keputusan dalam Pengukuran Kinerja;
 - l. Pengukuran Kinerja telah dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan berjenjang meskipun hanya di tingkat manajerial belum sampai kepada level pelaksana/individu/ staf.
 - m. Hasil Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulannya. Hal ini dapat dilihat pada Laporan bulanan kinerja masing-masing pegawai dalam aplikasi e_kinerja kabupaten.
 - n. Telah terdapat efisiensi anggaran dalam upaya pencapaian kinerja. Berdasarkan Laporan RFK hingga Juli 2023, diperoleh informasi bahwa hingga bulan Juli 2023, persentase capaian atas realisasi fisik melebihi capaian atas

realisasi anggaran. Dengan demikian efisiensi anggaran pada Sekretariat Daerah sudah mulai terwujud.

Selanjutnya faktor-faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Pohon Kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Renja belum memperlihatkan adanya perbaikan/penyempurnaan kinerja.
- c. Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran capaian kinerja pada Sekretariat Daerah belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- d. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap penyesuaian strategi, kebijakan, anggaran serta aktivitas dalam upaya pencapaian kinerja.
- e. Pegawai pada Sekretariat Daerah belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
- f. Evaluasi Kinerja Internal hanya sampai tingkat manajerial belum sampai ke level pelaksana/individu/staf.

Selanjutnya melihat dari penjelasan pada bab II di atas, bahwa perlunya bentuk intervensi Rencana Kerja perubahan Tahun 2024 terhadap capaian kinerja Rencana Strategis dengan cara membangun upaya – upaya perbaikan perencanaan kinerja yang akan dilakukan sebagai penanganan faktor-faktor penghambat dalam pencapaian kinerja :

A. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

1. Melaksanakan asistensi terhadap pemenuhan dokumen harmonisasi peraturan perundang-undangan

2. Optimalisasi komitmen terhadap pimpinan tinggi pemrakarsa dalam kegiatan rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan guna pengambilan keputusan yang berkualitas
3. Melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap peraturan perundang undangan berdasarkan target rencana kerja tahunan guna peningkatan kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang undangan berdasarkan hasil reuiu
4. Melaksanakan analisis dan evaluasi secara periodik terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan melibatkan seluruh pejabat fungsional analis hukum agar mengupayakan tindak lanjut perbaikan atas hasil rekomendasi
5. Melakukan pengelolaan JDIH dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum guna memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDIH.

B. Nilai Evaluasi Kinerja Penyeenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya Asuransi Pertanian (AUTP) kepada petani tetap harus dilakukan dengan dukungan Aparat dan Tokoh masyarakat Desa. Karena apabila petani memiliki kesadaran akan pentingnya Asuransi Pertanian (AUTP), maka hal ini memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan oraganisme pengganggu tumbuhan
2. Mengalihkan kerugian akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT. Sebab di Tahun tahun mendatang Perubahan iklim dianggap sebagai salah satu ancaman yang sangat serius terhadap sektor pertanian dan berpotensi mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan produksi pangan dan sistem produksi pertanian
3. Kegiatan sebaiknya dilakukan pada musim kemarau, karena dimusim hujan akan menyulitkan dalam mobilisasi bahan dan

alat di lokasi pekerjaan. Untuk mendukung hal tersebut, pelelangan bisa dilaksanakan lebih awal (Lelang Pra-DIPA)

C. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

1. Mendorong dan melakukan monitoring atas pencatatan rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP oleh seluruh unit kerja Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan tenggat waktu pada tanggal 31 Maret tahun N dan tahun N+1
2. Melaksanakan e-Tendering pada seluruh kegiatan PBJ tahun 2024 yang metode pemilihannya melalui tender dengan target sebesar 100%
3. Mendorong dan melakukan monitoring agar seluruh unit kerja Perangkat Daerah menyelesaikan seluruh paket e-Purchasing yang telah direncanakan di SiRUP
4. Mendorong dan melakukan monitoring agar seluruh unit kerja Perangkat Daerah melaksanakan transaksi atau mencatatkan pelaksanaan paket non eTendering/non e-Purchasing pada SPSE sesuai dengan yang telah direncanakan di SiRUP
5. Mendorong dan melakukan monitoring agar seluruh unit kerja Perangkat Daerah mencatatkan e-Kontrak atas paket yang telah selesai proses pemilihan penyedia
6. Mendorong dan melakukan pemantauan pada seluruh unit kerja Perangkat daerah untuk berkomitmen pada disbursement plan sehingga mengurangi risiko terjadinya penyerapan yang rendah pada periode selanjutnya

D. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Melakukan monitoring dan pendampingan pada unit pelayanan publik
2. Melaksanakan penilaian mandiri kepatuhan standar pelayanan pada unit pelayanan publik
3. Melaksanakan SKM bagi unit Pelayanan Publik Langkah langkah untuk tahun ke depan

4. Melaksanakan penilaian mandiri kepatuhan standar pelayanan pada unit pelayanan publik

E. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan

1. Menyempurnakan laporan kinerja Perangkat Daerah untuk mengungkapkan seluruh informasi pencapaian kinerja yang dimiliki, khususnya terkait analisis keberhasilan dan kegagalan dari setiap kinerja yang ditetapkan dan upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan
2. Mengoptimalkan pemanfaatan pelaporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja

F. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

1. Menyusun Pohon Kinerja yang memenuhi prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga kinerja yang dijabarkan dalam Pohon Kinerja cukup untuk menghasilkan outcome yang ingin dicapai, berani keluar dari kondisi eksisting untuk mendapatkan hasil yang terbaik, bersifat antisipatif dengan menampilkan kinerja alternatif yang dapat dilaksanakan jika terjadi hal-hal diluar perencanaan, bersifat dinamis dengan menjabarkan kinerja yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan
2. Melaksanakan koordinasi dengan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala untuk memperoleh kebijakan tentang penetapan Renja dan atau Renja Perubahan pada periode mendatang
3. Menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan dengan memuat rencana perbaikan kinerja, mengacu pada Renstra 2023-2016 dan

Perubahannya, bukan hanya copy paste dari periode sebelumnya, serta memuat analisis, alasan atau penyebab diperlukannya penyesuaian anggaran

4. Melengkapi Pedoman/ Mekanisme Pengumpulan Data dengan SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data
5. Melaksanakan koordinasi dengan Diskominfo sebagai upaya pembangunan Teknologi Informasi (Aplikasi) dan memanfaatkannya untuk Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran capaian kinerja
6. Memanfaatkan Pengukuran Kinerja dalam penyesuaian strategi, kebijakan, anggaran serta aktivitas dalam upaya pencapaian kinerja pada saat penyusunan Renja dan Renja Perubahan pada periode mendatang
7. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja pada setiap jenjang mulai pejabat struktural hingga pelaksana/ staf di Sekretariat Daerah sehingga terwujud komitmen untuk memperbaiki kinerja
8. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penyajian informasi dalam LKjIP pada setiap jenjang mulai pejabat struktural hingga pelaksana/ staf di Sekretariat Daerah sehingga terwujud komitmen untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja
9. Memanfaatkan Informasi dalam Laporan kinerja berkala seperti Laporan Monev Rencana aksi dan Laporan RFK untuk penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
10. Memanfaatkan Informasi dalam Laporan kinerja tahunan/ LKjIP dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya yakni saat penyusunan dokumen Renja 2024
11. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Internal dengan pendalaman yang memadai secara komprehensif hingga ke level pelaksana/staf

dengan memberikan upaya-upaya perbaikan dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti

12. Melaksanakan koordinasi dengan Diskominfo sebagai upaya pembangunan Teknologi Informasi (Aplikasi) dan memanfaatkannya untuk Evaluasi Kinerja Internal Sekretariat Daerah

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
(Tabel T.C. 30)

Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi
		Tahun 2022 (thn n - 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2022 (thn n - 2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	13	12	12	13
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	984	1008	1008	984	1008	1008
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	12	12	12	12
Jumlah Orang yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi	Jumlah Orang yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi	10	10	7	10	10	7
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	102	12	12	102
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	48	12	12	48
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	28	12	12	28
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	11	12	12	11
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	12	12
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	10	12	12	10
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	36	12	12	36
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	1	2	2	1
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	3	1	1	3
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19	19	33	19	19	33
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	11	12	12	11
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	10	12	12	10
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	11	12	12	11

1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	19	4	4	19
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	18	32	18	18	32
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68	68	68	68	68	68
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	14	23	14	14	23
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	48	4	48	48	4
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	11	11	9	11	11	9
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	11	12	12	11
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	12	36	12	12	36
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	12	36	12	12	36
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12	12	36	12	12	36
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12	12	12	12	12	12
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12	12	12	12	12	12

1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	12	12	12	12	12
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12	12	12	12	12	12
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	12	12	12	12	12
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12	12	12	12	12	12
Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400	423	450	400	423	450
Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	2	2	3	2	2	3
Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400	423	450	400	423	450
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	12	12	12	12	12	12
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	12	12	12	12	12
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	12	12	12	12	12
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	12	12	12	12	12
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	12	12	12	12
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	12	12	12	12	12
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	12	12	12	12	12
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	250	250	250	250	250	250

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah SKPD yang bertanggungjawab membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif..

Pada tataran pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pada Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih akuntabel, kapabel dan melayani.
2. Belum Optimalnya Implementasi dan penerapan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi terhadap pelayanan Sekretariat Daerah antara lain :

- 1) Belum dilaksanakannya evaluasi dan sosialisasi terhadap beban kerja dan analisis jabatan setiap jabatan lingkup Sekretariat Daerah sehingga aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan kinerja yang diinginkan.
- 2) Masih sedikitnya Bagian-bagian yang menerapkan system data base dalam pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- 3) Masih rendahnya unit kerja yang menerapkan SOP dalam pelaksanaan kegiatan.

- 4) Masih kurangnya pemahaman pegawai mengenai pentingnya membuat laporan kinerja secara tertulis atas kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam suatu sistematika penyajian yang runtun dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan
- 5) Kurangnya SDM perancang produk hukum daerah pada bagian Hukum;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pemantau terhadap kebijakan daerah yang dilaksanakan Bagaian-Bagian sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian. Khususnya again Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pembangunan.
- 7) Komposisi penempatan sumberdaya aparatur pada bagian / unit kerja kurang merata.
- 8) Kurang memadainya prasarana kerja terutama computer/laptop yang belum sepenuhnya dimiliki pejabat struktural dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah adalah :

- 1) Adanya kebijakan pemerintah pusat yang tidak dibarengi dengan aturan pelaksanaan yang jelas sehingga menimbulkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda
- 2) Adanya tuntutan target kinerja dari pemerintah lebih tinggi yang tidak dibarengi dengan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakannya sehingga menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
- 3) Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pada tabel 2.8 ini disajikan perbandingan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan, dimana untuk pencapaian kinerja diperkirakan mencapai 100%.

TABEL 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Barito Kuala
(Tabel T.C. 31)

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	100	31,516,640,577	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	100	31,516,640,577
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	87.00			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	87.00	
	Jumlah Perangkat Daerah yang lolos tahapan administrasi	3			Jumlah Perangkat Daerah yang lolos tahapan administrasi	3	
	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP komponen Pelaporan Kinerja minimal 13	74.47			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP komponen Pelaporan Kinerja minimal 13	74.47	
	Rata-rata capaian komponen penilaian evaluasi SAKIP	100			Rata-rata capaian komponen penilaian evaluasi SAKIP	100	
	Persentase cakupan layanan administrasi umum perkantoran	100			Persentase cakupan layanan administrasi umum perkantoran	100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	25.50	21,111,600.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	25.50	21,111,600.00
	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	17.50			Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	17.50	
	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja	10.50			Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja	10.50	
	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	22.51			Nilai evaluasi SAKIP dari komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	22.51	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	21,111,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	21,111,600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	11,446,906,926	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	11,446,906,926
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1032	11,426,464,896	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1032	11,426,464,896
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10,474,750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10,474,750
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	9,967,280	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	9,967,280
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	104,180,750	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	104,180,750
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi	10	104,180,750	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi	10	104,180,750

RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	5,330,303,160	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	5,330,303,160
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	43,664,260	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	43,664,260
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	2,556,622,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	2,556,622,400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	884,795,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	884,795,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	80,850,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	80,850,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	18,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	18,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	402,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	402,500,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1,343,871,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1,343,871,500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	2,470,251,625	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	2,470,251,625
Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	320,000,000	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	320,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	1,027,901,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	1,027,901,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	1,122,350,625	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	1,122,350,625
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	1,751,916,504	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	1,751,916,504
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	232,983,350	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	232,983,350
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1,361,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1,361,500,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	157,433,154	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	157,433,154

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	4,703,788,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	4,703,788,800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	678,588,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	678,588,800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	931,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	931,600,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91	146,600,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91	146,600,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	2,947,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	2,947,000,000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	595,212,012	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	595,212,012
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	565,152,012	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	565,152,012
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9	30,060,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9	30,060,000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	674,155,000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja yang tercapai	100	674,155,000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	674,155,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	674,155,000
Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat ukuran	100	1,799,161,325	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat ukuran	100	1,799,161,325
	Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan	100			Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan	100	
	Persentase Perangkat Daerah pelayanan yang menerapkan Pembangunan Zona Integritas	100			Persentase Perangkat Daerah pelayanan yang menerapkan Pembangunan Zona Integritas	100	
	Persentase Perangkat Daerah dengan pelaporan kinerja sesuai Permenpan 53 tahun 2014	100			Persentase Perangkat Daerah dengan pelaporan kinerja sesuai Permenpan 53 tahun 2014	100	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	516,300,400	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	516,300,400
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	550,024,425	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	550,024,425
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12	732,836,500	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12	732,836,500
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	100	2,619,652,875	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	100	2,619,652,875
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	1,601,942,875	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	1,601,942,875
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	1,017,710,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	1,017,710,000

RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum Daerah yang diimplementasikan	100	12,298,969,713.00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum Daerah yang diimplementasikan	100	12,298,969,713.00
	Persentase capaian SPM urusan Pemerintahan	100			Persentase capaian SPM urusan Pemerintahan	100	
	Persentase capaian IKK urusan Pemerintahan	100			Persentase capaian IKK urusan Pemerintahan	100	
	Persentase capaian SPM urusan Kesejahteraan Rakyat	100			Persentase capaian SPM urusan Kesejahteraan Rakyat	100	
	Persentase capaian IKK urusan Kesejahteraan Rakyat	100			Persentase capaian IKK urusan Kesejahteraan Rakyat	100	
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian SPM urusan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	2,420,051,184.00	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian SPM urusan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	2,420,051,184.00
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK urusan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100			Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK urusan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	610,943,350	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	610,943,350
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12	576,763,834	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12	576,763,834
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12	1,232,344,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12	1,232,344,000
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian SPM urusan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	9,027,493,229.00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian SPM urusan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	9,027,493,229.00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	6,547,735,329	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	6,547,735,329
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12	2,479,757,900	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12	2,479,757,900
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas/sesuai peraturan pembentukan perundang-undangan	100	719,949,550.00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas/sesuai peraturan pembentukan perundang-undangan	100	719,949,550.00
	Persentase penanganan perkara hukum yang diselesaikan	100			Persentase penanganan perkara hukum yang diselesaikan	100	
	Persentase produk hukum yang terdokumentasi sebagai Informasi Hukum	100			Persentase produk hukum yang terdokumentasi sebagai Informasi Hukum	100	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400	332,681,250	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400	332,681,250
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	261,465,800	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	261,465,800
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400	125,802,500	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400	125,802,500
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK urusan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	131,475,750	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK urusan Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	131,475,750
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12	131,475,750	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12	131,475,750

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian SPM urusan Administrasi Pembangunan	100	2,080,729,345.00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian SPM urusan Administrasi Pembangunan	100	2,080,729,345.00
	Persentase capaian IKK Makro urusan Administrasi Pembangunan	100			Persentase capaian IKK Makro urusan Administrasi Pembangunan	100	
	Persentase capaian IKK urusan Administrasi Pembangunan	100			Persentase capaian IKK urusan Administrasi Pembangunan	100	
	Persentase capaian IKK Makro urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100			Persentase capaian IKK Makro urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100	
	Persentase capaian IKK urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100			Persentase capaian IKK urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100	
	Persentase Kebijakan urusan Pengadaan Barang dan Jasa yang diimplementasikan	100			Persentase Kebijakan urusan Pengadaan Barang dan Jasa yang diimplementasikan	100	
	Persentase Kebijakan urusan Pengadaan Barang dan Jasa yang diimplementasikan	100			Persentase Kebijakan urusan Pengadaan Barang dan Jasa yang diimplementasikan	100	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK Makro urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	100	392,484,770.00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK Makro urusan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	100	392,484,770.00
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	134,811,150	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	134,811,150
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	257,673,620	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	257,673,620
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK Makro urusan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	323,734,375.00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi capaian IKK Makro urusan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	323,734,375.00
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	88,152,375	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	88,152,375
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	235,582,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	235,582,000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan	100	1,364,510,200.00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan	100	1,364,510,200.00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	259,838,500	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	259,838,500
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	592,343,500	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	592,343,500
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	250	512,328,200	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	250	512,328,200

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Nasional Tahun 2020-2024 sesuai arahan Presiden Adalah :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Arah kebijakan satu terdiri atas

- b. tingkatan kualitas pendidikan dan kesehatan (penurunan Kematian ibu dan stunting)
- c. akses dan kualitas air minum dan sanitasi layak
- d. pendidikan dan pelatihan Vokasi
- e. penguatan bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran

Arah kebijakan dua sampai dengan lima terdiri atas :

- b. melanjutkan dan menyambungkan pembangunan Infrastruktur dengan kawasan produksi dan sektor unggulan
- c. penguatan ekonomi kreatif dan digital
- d. memperkuat stabilitas dan mitigasi bencana

Sesuai arah kebijakan nasional tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah dalam merumuskan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang harus mendukung dan merealisasikannya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tabel 3.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan				Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih akuntabel, kapabel dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	57,71	60,00	62,00	63,00	Meningkatnya efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Nilai Akhir Variabel Indikator yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	55,01	60,10	63,10	66,10
								Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai Hasil Evaluasi LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri	3.1836	3.2838	3.3894	3.4842
							Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Total Nilai pembobotan dari 8 komponen penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan	58.7	70.1	74.7	80.01
							Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Total dari Nilai persepsi per Unsur / Total unsur yang terisi) X Nilai penimbang	87	88	89	90
							Terwujudnya Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Lolos WBK	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan kriteria/ predikat WBK yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB	3	3	3	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemkab	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten	70,94	72,94	74,94	76,94	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan	Nilai hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB	11,30	11,90	12,50	13,90
							Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah skor atas 4 komponen penilaian SAKIP Sekretariat Daerah	76,01	78,05	80,25	82,01

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam empat tahun mendatang yaitu sebagai berikut :

a. Ada 2 (dua) Tujuan Sekretariat Daerah adalah sebagaiberikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih akuntabel, kapabel dan melayani
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten

b. Ada 2 (dua) Indikator Tujuan Sekretariat Daerah yaitu :

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten

c. Ada 5 (lima) Sasaran Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
4. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja PemerintahKabupaten
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

d. Ada 6 (enam) Indikator Sasaran Sekretariat Daerah meliputi :

1. Indeks Reformasi Hukum (IRH).
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
3. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
5. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan.
6. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala 2023 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan				Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih akuntabel, kapabel dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	57,71	60,00	62,00	63,00	Meningkatnya efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Nilai Akhir Variabel Indikator yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	55,01	60,10	63,10	66,10
								Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai Hasil Evaluasi LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri	3.1836	3.2838	3.3894	3.4842
							Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Total Nilai pembobotan dari 8 komponen penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan	58.7	70.1	74.7	80.01
							Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Total dari Nilai persepsi per Unsur / Total unsur yang terisi) X Nilai penimbang	87	88	89	90
							Terwujudnya Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Lolos WBK	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan kriteria/ predikat WBK yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB	3	3	3	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemkab	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten	70,94	72,94	74,94	76,94	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Komponen Pelaporan	Nilai hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB	11,30	11,90	12,50	13,90
							Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah skor atas 4 komponen penilaian SAKIP Sekretariat Daerah	76,01	78,05	80,25	82,01

3.3 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu Rencana Kerja khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran. Maka akan digambarkan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih akuntabel, kapabel dan melayani	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Peningkatan Efektivitas Kebijakan urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
			Terlaksananya penyelesaian penanganan perkara
			Terlaksananya pelayanan Informasi Hukum
			Terlaksananya kebijakan urusan Pemerintahan
			Terlaksananya kebijakan urusan Kesejahteraan rakyat
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Peningkatan Efektivitas Kebijakan urusan Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya kebijakan urusan Administrasi pembangunan
			Terlaksananya kebijakan urusan Ekonomi dan Sumber daya Alam
			Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Perangkat Daerah yang Proporsional dan menerapkan Pelayanan Prima	Terbentuknya Perangkat Daerah yang tepat ukuran
			Terlaksananya Perangkat Daerah yang menerapkan standarisasi pelayanan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	Peningkatan kualitas LKjIP Perangkat Daerah	Tersusunnya LKjIP Perangkat Daerah yang sesuai Permenpan 53 Tahun 2014
	Terwujudnya Pembangunan Zona Integritas	Peningkatan Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah Pelayanan	Terlaksananya Pembangunan Zona Integritas Pada Perangkat Daerah pelayanan
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Peningkatan Efektivitas Kebijakan Urusan Administrasi Umum	Terlaksananya Perencanaan kinerja yang berkualitas
			Terlaksananya Pengukuran kinerja yang berkualitas
			Terlaksananya Pelaporan kinerja yang berkualitas
			Terlaksananya evaluasi Akuntabilitas kinerja internal yang berkualitas
			Tercapainya target atas perjanjian kinerja individu
			Terlaksananya Pelayanan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2025

Adapun program dan kegiatan Sekretariat Daerah dalam 1 Tahun ke depan yang disajikan dalam bentuk tabel 3.4 yang dirumuskan sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - A. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat laporan capaian kinerja yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna perencanaan kegiatan selanjutnya.
 - B. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan ini berupa penyediaan gaji untuk ASN Setda dan Kecamatan serta TPP untuk ASN Setda
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - C. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Kegiatan ini berupa pembuatan ID Card untuk ASN
 - 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengirimkan staf dalam mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan, SAKIP dan BMD.
 - D. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan belanja instalasi listrik dan telepon.
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini merupakan pendukung urusan umum untuk melaksanakan tupoksi sehari-hari yang digunakan untuk belanja alat tulis kantor dan

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kegiatan ini digunakan untuk belanja makan minum rapat dan makan minum pegawai.
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan ini merupakan pendukung urusan umum untuk melaksanakan tupoksi sehari-hari yang digunakan untuk cetak dan penggandaan.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan SDM Sekretariat Daerah
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kegiatan ini berupa Penyediaan makan minum Tamu Setda dan Tamu KDH/ WKDH.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan ini digunakan untuk belanja perjalanan akomodasi keluar daerah.

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kegiatan ini berupa Pembelian Mobil Dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih Hasil Pilkada Tahun 2025
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kegiatan ini berupa pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 atau 4 sebagai sarana transportasi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan ini berupan pengadaan peralatan dan mesin dalam menunjang kelancaran tugas kantor.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dititik beratkan pada belanja modal pengadaan perlengkapan perkantoran, yaitu alat penunjang yang tidak secara langsung digunakan dalam pelaksanaan tugas kantor.

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini merupakan pendukung dalam kegiatan operasional pada masing-masing bidang dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari utamanya dalam meningkatkan koordinasi baik di tingkat lingkungan Kabupaten maupun di tingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat dalam melaksanakan urusan umum.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan pendukung dalam kegiatan operasional untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Sekretariat daerah dan Rumah dinas jabatan.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini berupa belanja yang diperuntukkan untuk Non PNS dan pembelian peralatan bahan pembersih dalam upaya mendukung kenyamanan kantor.

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini berupa belanja untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 serta untuk mendukung kinerja operasional kegiatan dan untuk mempertahankan kegunaan kendaraan jabatan/operasional.

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan peralatan gedung kantor.

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan dari sarana dan prasarana.

H. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini berupa penyediaan pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus hari-hari tertentu untuk Pimpinan Daerah

I. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- ❖ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Kegiatan ini berupa penyediaan logistik, rumah tangga dan bahan makanan untuk keperluan 1 tahun.

J. Penataan Organisasi

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Kegiatan ini berupa Penyusunan SOP, Standar Kompetensi jabatan, Analisis jabatan, dan Analisis Beban Kerja.

2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Kegiatan ini berupa Bimtek Inovasi, Penilaian Kinerja Pelayanan Publik, dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Fokus dari kegiatan ini ialah penyusunan LKIP pemerintah Daerah, Fasilitas Penguatan SAKIP SKPD dan penguatan Implementasi RB pada SKPD dan Pemerintah daerah.

K. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1. Fasilitas Keprotokolan

Kegiatan ini berupa penyediaan Perjalanan Dinas untuk KDH/ WKDH, ADC, Petugas Protokol serta Tenaga peliputan.

2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan

Kegiatan difokuskan pada Kerjasama Media massa, Pemberitaan Kegiatan pemerintah Daerah, serta fasilitas komunikasi Pimpinan Daerah dengan masyarakat maupun stakeholder lainnya.

II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat

A. Administrasi Tata Pemerintahan

1. Penataan Administrasi Pemerintahan

Kegiatan ini terdiri dari banyak kegiatan pada Permendagri 13 antara lain: penyusunan LKPJ dan LPPD, Pelaksanaan HUT-RI dan Hari Jadi kabupaten, serta pembinaan Organisasi wanita

2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Kegiatan ini berupa penyelesaian batas antar kabupaten, batas antar desa, sosialisasi kebijakan perbatasan, serta sertifikasi dan inventarisasi Tanah milik pemerintah daerah.

3. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Meliputi kegiatan dukungan Pelaksanaan Pilkada dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

B. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Kegiatan ini berupa fasilitasi kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten, provinsi, dan nasional, Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Agama, Penyediaan Honor Guru Madrasah dan TPA, Bantuan Tempat Ibadah serta pemberian hibah kepada lembaga agama maupun lembaga kemasyarakatan.

2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan yang menyangkut kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat.

C. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Berupa kegiatan yang mendukung proses legislasi dan pembentukan produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah.

2. Fasilitasi Bantuan Hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara hukum yang menyangkut instansi pemerintah ataupun membantu dan mendampingi permasalahan hukum yang melibatkan ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kab. Batola.

3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Dokumentasi produk hukum daerah baik secara manual maupun digital serta pengelolaan website hukum JDIH merupakan inti dari kegiatan ini.

D. Fasilitasi Kerjasama Daerah

❖ Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Fokus dari kegiatan ini adalah menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk kemajuan pembangunan dan inovasi daerah.

III. Program Perekonomian dan Pembangunan

A. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

1. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memonitoring kebijakan daerah disektor ekonomi mikro dan memberikan stimulus kepada pelaku ekonomi mikro kecil melauai lomba produkmunggulan daerah.

2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Berupa kegiatan pemantauan harga pangan dan aktivitas pasar serta rapat tim pengendalian inflasi daerah.

B. Administrasi Pembangunan

1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau capaian dan perkembangan dari indikator kinerja utama dari Pemerintah kabupaten di dalam RPJMD.

2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD.

C. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini berupa fasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk seluruh SKPD di kabupaten barito kuala.

2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Operasional LPSE selama 12 bulan serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa merupaka fokus dari kegiatan ini.

3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini berupa sosialisasi Peraturan Pengadaan barang dan jasa kepada SKPD dan monev pengadaan barang dan jasa yang dilakukan SKPD.

D. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam

- ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Kegiatan ini berupa rapat-rapat dan monev pelaksanaan kebijakan di bidang ertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Barito Kuala
(Tabel T.C 33)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan layanan kegiatan Setda	Dalam Daerah dan Luar Daerah	100%	32.252.816.503	APBD		100%	34.019.876.513
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan laporan evaluasi kinerja tahunan	Marabahan	3 Dokumen	56.500.000	APBD		3 Dokumen	56.500.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Realisasi kinerja/ fisik/ Keuangan	Marabahan	13 laporan	56.500.000	APBD		13 Laporan	56.500.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	Marabahan	12 Bulan	29.206.310.000	APBD		12 Bulan	29.507.000.000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Marabahan	12 bulan	29.200.000.000	APBD		12 bulan	29.500.000.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	Marabahan	1 laporan	3.750.000	APBD		1 laporan	4.000.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Marabahan	1 laporan	2.560.000	APBD		1 laporan	3.000.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	2 Dokumen	99.575.000	APBD		2 Dokumen	124.575.000
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ID Card ASN dibuat	Marabahan	900 buah	19.575.000	APBD		900 buah	19.575.000
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Luar daerah	6 orang	80.000.000	APBD		8 orang	105.000.000

X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	2,740,000,000	APBD		12 Bulan	2,895,000,000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis pembelian komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Marabahan	30 jenis	60,000,000	APBD		30 jenis	70,000,000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	48 jenis	400,000,000	APBD		52 jenis	400,000,000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman harian pegawai dan rapat	Marabahan	19000 porsi	395,000,000	APBD		21000 porsi	420,000,000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan berkas kantor dan jumlah penggandaan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	60 jenis	120,000,000	APBD		65 jenis	135,000,000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar harian	Marabahan	600 eksemplar	65,000,000	APBD		600 eksemplar	70,000,000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makanan dan minuman Tamu	Marabahan	16000 porsi	600,000,000	APBD		16000 porsi	600,000,000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	240 OK	1,100,000,000	APBD		250 OK	1,200,000,000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	15 Unit	2,996,000,000	APBD		13 Unit	400,000,000
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Luar Daerah	2 unit	2,600,000,000	APBD		0	-
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Luar Daerah	4 unit	96,000,000	APBD		4 unit	100,000,000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	Dalam Daerah dan Luar Daerah	8 unit	100,000,000	APBD		8 unit	100,000,000
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana prasarana gedung kantor	Marabahan	1 bangunan	200,000,000	APBD		1 bangunan	200,000,000

X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Marabahan	12 Bulan	1,420,000,000	APBD		12 Bulan	1,551,000,000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	Marabahan	3500 buah	90,000,000	APBD		3500 buah	11,000,000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan listrik, PDAM, telepon dan internet	Marabahan	12 bulan	1,040,000,000	APBD		12 bulan	1,240,000,000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bangunan gedung dan kantor yang dilakukan pemeliharaan kebersihannya	Marabahan	5 bangunan	290,000,000	APBD		5 bangunan	300,000,000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana barang milik daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	2,412,400,000	APBD		12 Bulan	2,515,000,000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang siap operasional	Dalam Daerah dan Luar Daerah	7 unit	720,000,000	APBD		7 unit	750,000,000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang siap operasional	Dalam Daerah dan Luar Daerah	60 unit	986,000,000	APBD		60 unit	1,020,000,000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dalam Daerah dan Luar Daerah	72 buah	131,400,000	APBD		72 buah	150,000,000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Marabahan	7 bangunan	575,000,000	APBD		7 bangunan	595,000,000
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	2,616,465,000	APBD		12 Bulan	2,670,465,000
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan Penunjang Operasional KDH/ WKDH	Marabahan	12 bulan	2,320,465,000	APBD		12 bulan	2,350,465,000
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas KDH/ WKDH	Dalam Daerah dan Luar Daerah	72 stel	296,000,000	APBD		72 stel	320,000,000

X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Marabahan	12 Bulan	998,000,000	APBD		12 Bulan	1,200,000,000
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah jenis penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/ WKDH	Marabahan	12 bulan	998,000,000	APBD		12 bulan	1,200,000,000
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah kebijakan bidang organisasi yang berjalan efektif	Dalam Daerah dan Luar Daerah	5 Kebijakan	393,000,000	APBD		5 Kebijakan	455,000,000
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah dokumen analisis kelembagaan dan Anjab yang disusun SKPD	Dalam Daerah dan Luar Daerah	47 Dokumen	52,000,000	APBD		47 Dokumen	65,000,000
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah SKPD dengan Nilai Kinerja Pelayanan Publik diatas 80	Dalam Daerah dan Luar Daerah	30 SKPD	196,000,000	APBD		30 SKPD	210,000,000
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD dengan Nilai SAKIP minimal B	Dalam Daerah dan Luar Daerah	20 SKPD	145,000,000	APBD		20 SKPD	180,000,000
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang terlaksana	Dalam Daerah dan Luar Daerah	100%	3,850,000,000	APBD		100%	4,350,000,000
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi Pimpinan daerah yang di fasilitasi	Dalam Daerah dan Luar Daerah	150 OK	1,300,000,000	APBD		180 OK	1,500,000,000
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan daerah yang terdokumentasi dan terpublikasi	Dalam Daerah dan Luar Daerah	240 kegiatan	2,550,000,000	APBD		240 kegiatan	2,850,000,000

4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra yang berjalan Efektif	Dalam Daerah dan Luar Daerah	6 Dokumen	7,482,000,000	APBD		6 Dokumen	7,740,000,000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan penataan administrasi pemerintahan kewilayahan yang terlaksana	Dalam Daerah dan Luar Daerah	8 Kegiatan	2,235,000,000	APBD		8 Kegiatan	2,245,000,000
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kegiatan implementasi kebijakan bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	5 kegiatan	1,550,000,000	APBD		5 kegiatan	1,650,000,000
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang bersertifikat dan jumlah titik batas terselesaikan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	150 SHP, 5 titik batas	625,000,000	APBD		50 SHP, 20 titik batas	525,000,000
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan implementasi otda yang terlaksana	Dalam Daerah dan Luar Daerah	2 kegiatan	60,000,000	APBD		2 kegiatan	70,000,000
4.01.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kebijakan bidang kesra yang ditetapkan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	4 Dokumen	4,902,000,000	APBD		4 Dokumen	5,090,000,000
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	18 kegiatan	4,820,000,000	APBD		18 kegiatan	5,000,000,000
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen evaluasi bidang kesra yang dibuat	Dalam Daerah	3 dokumen	82,000,000	APBD		3 dokumen	90,000,000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai peraturan pembentukan perundang-undangan (Perda)	Dalam Daerah dan Luar Daerah	10 Perda	305,000,000	APBD		10 Perda	345,000,000
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah berupa (RAPERDA) diajukan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	10 Raperda	110,000,000	APBD		10 Raperda	120,000,000
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara/ sengketa/ masalah hukum yang difasilitasi	Dalam Daerah dan Luar Daerah	2 Perkara	135,000,000	APBD		2 Perkara	145,000,000
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk Hukum yang didokumentasikan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	400 buah	60,000,000	APBD		400 buah	80,000,000
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama daerah yang terlaksana	Luar daerah	2 kerjasama	40,000,000	APBD		3 kerjasama	60,000,000
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama daerah yang difasilitasi	Luar daerah	2 kerjasama	40,000,000	APBD		3 kerjasama	60,000,000

4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen kebijakan ekonomi, Pembangunan, dan Pengadaan Barang/ Jasa yang berjalan Efektif	Dalam Daerah dan Luar Daerah	5 Dokumen	1,185,000,000	APBD		5 Dokumen	1,270,000,000
4.01.03.2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen kebijakan ekonomi yang ditetapkan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	4 Dokumen	140,000,000	APBD		4 Dokumen	155,000,000
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah kegiatan evaluasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dalam Daerah dan Luar Daerah	4 Kegiatan	85,000,000	APBD		4 Kegiatan	95,000,000
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan koordinasi dan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dalam Daerah dan Luar Daerah	4 Kegiatan	55,000,000	APBD		4 Kegiatan	60,000,000
4.01.03.2.02	Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen kebijakan pembangunan yang ditetapkan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	2 Dokumen	118,000,000	APBD		2 Dokumen	140,000,000
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi program pembangunan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	3 Dokumen	60,000,000	APBD		3 Dokumen	70,000,000
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	3 laporan	58,000,000	APBD		3 laporan	70,000,000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	4 Dokumen	895,000,000	APBD		4 Dokumen	940,000,000
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitas Pengadaan Barang/ Jasa	Dalam Daerah dan Luar Daerah	150 Pengadaan	180,000,000	APBD		150 Pengadaan	200,000,000
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya operasional LPSE selama 12 bulan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	670,000,000	APBD		12 Bulan	690,000,000
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah SKPD yang dibina Pengadaan Barang/ Jasa	Dalam Daerah dan Luar Daerah	47 SKPD	45,000,000	APBD		47 SKPD	50,000,000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Terkait Sumber Daya Alam yang ditetapkan	Dalam Daerah dan Luar Daerah	1 Dokumen	32,000,000	APBD		1 Dokumen	35,000,000
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait Sumber daya alam	Dalam Daerah dan Luar Daerah	3 Laporan	32,000,000	APBD		3 Laporan	35,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Tahun 2025

Urusan Bidang/UrusanProgram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2024	
			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan layanan Kegiatan Setda		100	32.252.816.503
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen kinerja yang sesuai standar dan tepat waktu		100	41.111.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	41.111.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu		100	11.776.675.445
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1008	11.756.233.415
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	10.474.750
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	9.967.280
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	184.180.750
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	184.180.750

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah		100	5.681.298.800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118	72.311.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48	2.556.622.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32	912.300.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11	80.850.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	18.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	402.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36	1.638.714.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan		100	2.150.251.625
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	1.027.901.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33	1.122.350.625
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	1.751.916.504
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11	232.983.350
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	1.361.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11	157.433.154

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100	4.895.819.967
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19	712.300.987
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32	1.024.518.980
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68	212.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23	2.947.000.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah		100	595.212.012
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	565.152.012
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9	30.060.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100	812.345.600
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	812.345.600
Penataan Organisasi	Persentas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Organisasi		100	1.744.351.325
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36	461.490.400
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36	550.024.425
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36	732.836.500
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan Daerah yang terfasilitasi		100	2.619.652.875
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	1.601.942.875
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	1.017.710.000

4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan		100	12.298.969.713
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase rumusan kebijakan administrasi tata pemerintahan yang dikoordinasikan		100	2.420.051.184
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	610.943.350
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18	576.763.834
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	1.232.344.000
4	1	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dikoordinasikan		100	9.027.493.229
4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53	6.547.735.329
4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22	2.479.757.900
4	1	2	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rumusan kebijakan hukum yang dikoordinasikan		100	719.949.550
4	1	2	2	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425	332.681.250
4	1	2	2	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	261.465.800
4	1	2	2	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425	125.802.500
4	1	2	2		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase rumusan kebijakan Kerjasama dan otonomi daerah yang dikoordinasikan		100	131.475.750
4	1	2	2	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	131.475.750
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan		100	2.080.729.345
4	1	3	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan sumber daya alam yang dikoordinasikan		100	392.484.770
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	134.811.150
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	257.673.620
4	1	3	2		Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan Program Pembangunan lintas sektor yang dikoordinasikan		100	323.734.375
4	1	3	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	88.152.375
4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	235.582.000
4	1	3	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan		100	1.364.510.200
4	1	3	2	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	259.838.500
4	1	3	2	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	592.343.500
4	1	3	2	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200	512.328.200
JUMLAH									46.632.515.561

TABEL 4.2
Rencana Belanja Hibah Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Volume/ Satuan	Pagu
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	45 Buah	5.015.000.000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	45 Buah	5.015.000.000
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	43 Buah	3.015.000.000
	Belanja Hibah untuk Sekolah/Yayasan Pendidikan Agama	10 Buah	1.175.000.000
	Belanja Hibah Untuk Tempat Ibadah	29 Buah	1.190.000.000
	Belanja Hibah untuk Lembaga/Organisasi Keagamaan	4 Buah	650.000.000
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2 Buah	2.000.000.000
	Belanja Hibah untuk Le,mbaga Perguruan Tinggi Negeri	1 Buah	1.000.000.000
	Belanja Hibah untuk Le,mbaga Perguruan Menengah Negeri	1 Buah	1.000.000.000

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya dokumen ini dapat digambarkan program kegiatan-Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 untuk mencapai target indikator.

Jumlah program kegiatan-sub kegiatan pada Tahun 2025 adalah 3 program, 19 kegiatan, dan 51 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 46.632.515.561 ,-

Selanjutnya dokumen ini akan menjadi pedoman penyusunan RKA Sekretariat Daerah Tahun 2025. Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan prioritas Pelayanan Administrasi Keuangan dalam rangka Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan baik sebagaimana Visi dan Misi Sekretariat Daerah, serta Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Selanjutnya Sekretariat Daerah akan melaksanakan Program Pelayanan sesuai dengan Program Pembangunan dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, diharapkan dapat terealisasi secara optimal dan mencapai sasaran.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.